



RENCANA KERJA (RENJA) SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-3
1.2. Landasan Hukum.....	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-6
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-6
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	II-19
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026.....	II-22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-32
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	III-1
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	III-2
3.3. Program, Kegiatan dan Subkegiatan.....	III-4
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	IV-1
BAB V PENUTUP.....	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	:	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024.....	II-2
Tabel 2.2	:	Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024.....	II-8
Tabel 2.3	:	Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah.....	II-18
Tabel 2.4	:	Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026.....	II-24
Tabel 2.5	:	Persandingan Daftar Kegiatan Prioritas Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2026 Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.....	II-37
Tabel 2.6	:	Usulan Program Dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026.....	II-38
Tabel 3.1	:	Interkoneksi Prioritas Daerah Kota Payakumbuh dengan Prioritas Nasional.....	III-1
Tabel 3.2	:	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	III-3
Tabel 3.3	:	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027.....	III-8
Tabel 4.1	:	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh.....	IV-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	:	Bagan SOTK Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh.....	II-17
-------------	---	--	-------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/ Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026, merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah tahun ke-tiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Payakumbuh, yang disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Kota Payakumbuh serta berdasarkan pertimbangan terhadap hasil evaluasi akhir periode RPJMD tahun 2017-2022, dokumen ini juga dijadikan sebagai instrumen dalam mewujudkan muatan-muatan yang terkandung pada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Perencanaan dilaksanakan secara spesifik, terukur, didukung ketersediaan sumber daya, tepat waktu penyelesaiannya dan menyeimbangkan asas bottom up dan top down.

Sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya RKPD Tahun 2026, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dan mengacu kepada RKPD.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Sekretariat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- a. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari tujuan dan sasaran prioritas serta dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. Rencana Kerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026.
- c. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja Satuan Perangkat Daerah pada tahun 2026.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan Penyusunan Rencana Kerja. Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6677);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Satuan Harga Satuan Regional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 57);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

- Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 227);
21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);
 22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
 23. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 15);
 24. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
 25. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 6. Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 68);
 26. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 69);
 27. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);
 28. Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
 29. Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;

30. Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
31. Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2025;
32. Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh adalah :

1. Memberikan fokus kerja organisasi dan pelayanan yang lebih diarahkan pada mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dan mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
2. Sebagai pedoman bagi Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama periode 1 (satu) tahun anggaran.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan rencana kerja Sekretariat Daerah adalah :

1. Mewujudkan tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan;
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Sekretariat Daerah;
3. Meningkatkan pelayanan Masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.3.Maksud dan Tujuan
- 1.4.Sistematika Penulisan

BAB II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Lalu

- 2.1.Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2.Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

3.3.Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V. Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Evaluasi Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh tahun 2024 berguna untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana kerja Sekretariat Daerah apakah sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dan menjadi pertimbangan untuk pelaksanaannya pada tahun berikutnya serta kemungkinan adanya kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan dilapangan.

Evaluasi rencana kerja difokuskan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Terhadap capaian program yang berkaitan dengan target dari program yang tercantum pada Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 sudah sesuai dengan target capaian program pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 yaitu :

1. Nilai IKM, target 88,50 terealisasi 88,37 dengan capaian sebesar 99,85%
2. Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat, target A terealisasi dengan nilai BB dengan capaian sebesar 87,50%

Sebagian besar sudah ditindaklanjuti rekomendasi dari Inspektorat terhadap evaluasi dari dokumen LkjIP Sekretariat Daerah.

3. Nilai LPPD, target 3,1700 terealisasi sebesar 3,0788 dengan capaian 97,12%
4. Indeks Reformasi Hukum, target 73 terealisasi sebesar 87 dengan capaian sebesar 119,18%.
5. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa, terget 76 terealisasi sebesar 91,58 dengan capaian 120%

Adapun untuk lebih jelasnya terhadap realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kota Patakumbuh**

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sampai Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dn Keluaran Kegiatan s/dinerja Renstra pada Renja s.d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
										Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2024 (n-2)		Realisasi Kinerja Anggaran Renja Tahun 2024 (n-2)			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Renstra Target Renstra (%)		
1					2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
							K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
							unit	satuan		unit		unit		unit					
4					Urusan Pendukung				87.538.702.681		26.386.177.187		27.734.626.737		25.304.280.698	91,24	31.685.599.087	83.376.056.972	95,24
4	01				Urusan Pendukung Kesekretariatan Daerah	Nilai LPPD	3,200	Nilai	87.538.702.681	3,3922	26.386.177.187	3,1800	27.734.626.737		25.304.280.698	91,24	31.685.599.087	83.376.056.972	95,24
						Nilai IKM	88,80	Nilai		89,65		88,50		88,37				-	
4	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai IKM	88,80	Nilai	79.348.043.323	89,65	20.790.939.403	88,50	23.631.888.937	88,37	21.422.646.964	90,65	26.859.171.687	69.072.758.054	87,05
						Nilai Evaluasi AKIP SETDAKO oleh Inspektorat	A	Nilai		B		A		BB				-	
4	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja program/ kegiatan	100	persen	363.200.000	100	125.364.880	100	135.921.350	100	131.891.690	97,04	99.394.050	356.650.620	98,20
						IKM Sekretariat Daerah	90	Nilai		89,91		88		89,01				-	
4	01	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	dokumen	153.100.000	4	56.852.220	4	68.737.850	4	65.762.370	95,67	16.812.300	139.426.890	91,07
4	01	01	2,01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	laporan	210.100.000	4	68.512.660	4	67.183.500	4	66.129.320	98,43	82.581.750	217.223.730	103,39
4	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	90	persen	39.003.615.648	50	9.179.430.317	90	10.433.216.102	90	9.126.380.512	87,47	11.194.119.696	29.499.930.525	75,63
4	01	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84	orang/bulan	36.763.615.648	77	8.655.803.397	71	9.956.523.102	71	8.671.127.592	87,09	10.643.997.096	27.970.928.085	76,08
4	01	01	2,02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	laporan	2.240.000.000	12	523.626.920	12	476.693.000	12	455.252.920	95,50	550.122.600	1.529.002.440	68,26
4	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	100	persen	200.000.000	100	49.905.300	100	20.000.000	100	19.922.680	99,61	50.000.000	119.827.980	59,91
4	01	01	2,03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	dokumen	200.000.000	1	49.905.300	1	20.000.000		19.922.680	99,61	50.000.000	119.827.980	59,91
4	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	persen	400.000	100	41.385.240		-		-		80.000.000	121.385.240	100,00
4	01	01	2,05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	paket	400.000	0	41.385.240		-		-		80.000.000	121.385.240	100,00
4	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum Sekretariat Daerah sesuai standar	100	persen	5.146.397.250	100	3.071.845.678	100	3.973.129.500	100	3.870.343.368	97,41	2.274.586.500	9.216.775.546	100,00
4	01	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	113.378.760	1	47.498.010	11	80.155.000	11	72.031.500	89,87	34.985.000	154.514.510	100,00
4	01	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatandan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	paket	111.054.350	1	442.620.000	27	360.600.000	27	357.575.000	99,16	99.996.000	900.191.000	100,00
4	01	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	paket	128.704.340	1	34.170.250	23	32.224.150	23	32.182.000	99,87	69.743.000	136.095.250	100,00
4	01	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1	paket	242.859.800	1	60.657.810	9	41.847.750	9	41.745.930	99,76	57.822.350	160.226.090	65,97

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sampai Tahun 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dn Keluaran Kegiatan s/dinerja Renstra pada Renja s.d Tahun 2023 (n-3)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
													Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2024 (n-2)		Realisasi Kinerja Anggaran Renja Tahun 2024 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Renstra Targe Renstra (%)
4	01	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	dokumen	400.000	3	347.754.850	3	424.136.100	3	353.110.900	83,25	424.123.150	1.124.988.900	100,00	
4	01	01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	laporan	1.800.000.000	1	881.713.506	1	1.329.726.500	1	1.309.457.265	98,48	889.697.000	3.080.867.771	100,00	
4	01	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144	laporan	2.750.000.000	138	1.257.431.252	144	1.704.440.000	144	1.704.240.773	99,99	698.220.000	3.659.892.025	133,09	
4	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor	90	persen	171.600.000	90	509.053.500		-		-		3.482.451.313	3.991.504.813	100,00	
4	01	01	2,07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2	unit	200.000		-		-		-		1.600.000.000	1.600.000.000	100,00	
4	01	01	2,07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	unit	400.000		-		-		-		1.446.222.000	1.446.222.000	100,00	
4	01	01	2,07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	unit	400.000		-		-		-		199.835.675	199.835.675	100,00	
4	01	01	2,07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	unit	169.800.000	63	327.120.000		-		-		44.898.000	372.018.000	100,00	
4	01	01	2,07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	unit	400.000	2	130.429.500		-		-		99.998.388	230.427.888	100,00	
4	01	01	2,07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	unit	400.000	3	51.504.000		-		-		91.497.250	143.001.250	100,00	
4	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100	persen	12.859.191.797	90	2.799.152.685	90	2.977.357.005	90	2.786.058.860	93,57	3.228.481.810	8.813.693.355	68,54	
4	01	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	laporan	79.992.000	12	19.571.000		-		-		-	19.571.000	24,47	
4	01	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	laporan	3.659.540.000	12	943.880.686	12	959.900.668	12	869.912.228	90,63	941.039.294	2.754.832.208	75,28	
4	01	01	2,08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	laporan	640.991.588	1	277.222.126	1	400.449.000	1	399.634.450	99,80	391.787.800	1.068.644.376	100,00	
4	01	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umun kantor yang disediakan	1	laporan	8.478.668.209	12	1.558.478.873	12	1.617.007.337	12	1.516.512.182	93,79	1.895.654.716	4.970.645.771	58,63	
4	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	90	persen	5.340.680.000	90	1.285.068.364	90	1.533.982.660	90	1.511.472.676	98,53	1.998.208.800	4.794.749.840	89,78	
4	01	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	unit	2.405.600.000	13	478.391.475	12	478.410.000	12	478.395.648	100,00	612.180.000	1.568.967.123	65,22	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sampai Tahun 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dn Keluaran Kegiatan s/dinerja Renstra pada Renja s.d Tahun 2023 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
												Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2024 (n-2)		Realisasi Kinerja Anggaran Renja Tahun 2024 (n-2)			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Renstra Targe Renstra (%)
4	01	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45	unit	1.590.600.000	52	457.418.685	42	544.550.000	42	531.993.095	97,69	754.140.000	1.743.551.780	100,00
4	01	01	2,09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10	unit	125.400.000	10	39.622.000	10	10.000.000	10	9.563.600	95,64	27.500.000	76.685.600	61,15
4	01	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	unit	68.980.000	10	19.456.000	10	24.320.000	10	24.315.000	99,98	22.210.000	65.981.000	95,65
4	01	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	unit	600.100.000	4	128.093.764	4	325.902.660	4	321.306.633	98,59	430.258.800	879.659.197	100,00
4	01	01	2,09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	unit	100.000.000	4	24.057.280	4	43.000.000	4	39.570.500	92,02	25.000.000	88.627.780	88,63
4	01	01	2,09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	unit	450.000.000	4	138.029.160	4	107.800.000	4	106.328.200	98,63	126.920.000	371.277.360	82,51
4	01	01	2,11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kepada KDH dan WKDH	100	persen	2.568.360.168	100	479.158.000	100	747.179.970	100	653.549.675	87,47	1.590.553.868	2.723.261.543	100,00
4	01	01	2,11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	orang/bulan	729.879.228	1	8.090.000	1	258.488.450	1	174.570.675	67,54	845.117.768	1.027.778.443	100,00
4	01	01	2,11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2	paket	218.480.940	1	85.818.000	6	86.191.520	6	85.250.000	98,91	144.046.100	315.114.100	100,00
4	01	01	2,11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4	orang	20.000.000	-	-	2	2.500.000	-	-	-	10.000.000	10.000.000	50,00
4	01	01	2,11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	orang/bulan	1.600.000.000	1	385.250.000	1	400.000.000	1	393.729.000	98,43	591.390.000	1.370.369.000	85,65
4	01	01	2,12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase pelayanan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan baik	100	persen	2.476.598.380	100	408.408.957	85	694.470.800	85	668.223.829	96,22	1.313.546.700	2.390.179.486	96,51
4	01	01	2,12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1	paket	1.782.329.900	1	328.076.143	10	433.112.300	10	420.166.004	97,01	646.776.500	1.395.018.647	78,27
4	01	01	2,12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1	paket	400.200.000				-		-		534.695.000	534.695.000	100,00
4	01	01	2,12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1	paket	294.068.480	1	80.332.814	7	261.358.500	7	248.057.825	94,91	132.075.200	460.465.839	100,00
4	01	01	2,13		Penataan Organisasi	Indeks Kelembagaan Perangkat Daerah	39,09	indeks	1.459.795.410	39,09	564.333.868	39,09	276.077.450	39,09	272.282.030	98,63		836.615.898	57,31
4	01	01	2,13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1	dokumen	499.712.470	1	262.376.028	1	47.008.000	1	44.831.370	95,37	72.017.700	379.225.098	75,89

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sampai Tahun 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dn Keluaran Kegiatan s/dinerja Renstra pada Renja s.d Tahun 2023 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
												Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2024 (n-2)		Realisasi Kinerja Anggaran Renja Tahun 2024 (n-2)			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Renstra Targe Renstra (%)
4	01	01	2,13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	laporan	540.100.000	1	184.780.310	1	189.966.900	1	189.175.010	99,58	177.779.200	551.734.520	100,00
4	01	01	2,13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2	dokumen	419.982.940	2	117.177.530	2	39.102.550	2	38.275.650	97,89	39.102.750	194.555.930	46,32
4	01	01	2,14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase acara kedinasan (seremonial keprotokolan) yang difasilitasi dengan baik	100	persen	9.758.204.670	100	2.277.832.614	100	2.840.554.100	100	2.382.521.644	83,88	1.547.828.950	6.208.183.208	63,62
4	01	01	2,14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	laporan	584.996.590	12	106.804.500	12	138.005.550	12	112.848.260	81,77	99.980.050	319.632.810	54,64
4	01	01	2,14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	laporan	8.172.708.080	12	1.867.811.674	12	2.357.064.200	12	1.960.030.384	83,16	1.123.381.900	4.951.223.958	60,58
4	01	01	2,14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	laporan	1.000.500.000	12	303.216.440	12	345.484.350	12	309.643.000	89,63	324.467.000	937.326.440	93,69
4	01	02			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD	3,200	Nilai	6.184.959.448	3,3922	5.069.196.067	3,1800	3.707.719.250		3.520.499.884	94,95	4.483.520.900	13.073.216.851	100,00
						Indeks Reformasi Hukum	75	indeks		67,48	-	73		87	-			-	
4	01	02	2,01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik	100	persen	2.240.300.000	100	1.402.290.518	100%	779.447.000	100	761.335.482	97,68	769.713.300	2.933.339.300	100,00
						Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan tepat waktu	100	persen	-	100	-	100		100	-			-	
4	01	02	2,01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1	dokumen	840.100.000	1	642.794.773	1	338.853.850	1	332.820.507	98,22	331.930.000	1.307.545.280	100,00
4	01	02	2,01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	dokumen	540.100.000	1	350.469.795	1	63.888.950	1	62.606.625	97,99	53.035.750	466.112.170	86,30
4	01	02	2,01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1	dokumen	860.100.000	1	409.025.950	1	376.704.200	1	365.908.350	97,13	384.747.550	1.159.681.850	100,00
4	01	02	2,02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	100	persen	2.035.787.660	100	3.226.869.799	100	2.363.781.200	100	2.287.844.160	96,79	3.188.368.450	8.703.082.409	100,00
4	01	02	2,02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1	dokumen	680.100.000	1	899.319.030	1	559.135.500	1	529.539.290	94,71	700.158.250	2.129.016.570	100,00
4	01	02	2,02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1	dokumen	365.587.660	1	2.102.759.364	1	1.566.861.550	1	1.539.533.720	98,26	1.962.037.700	5.604.330.784	100,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sampai Tahun 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dn Keluaran Kegiatan s/dinerja Renstra pada Renja s.d Tahun 2023 (n-3)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
													Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2024 (n-2)		Realisasi Kinerja Anggaran Renja Tahun 2024 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Renstra Targe Renstra (%)
4	01	02	2,02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1	dokumen	990.100.000	1	224.791.405	1	237.784.150	1	218.771.150	92,00	526.172.500	969.735.055	97,94
4	01	02	2,03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi	100	persen	1.577.671.788	100	281.177.770	100	551.491.200	100	459.100.552	83,25	512.539.750	1.252.818.072	79,41
						Persentase koordinasi hukum yang difasilitasi	100	persen	-	100	-	100		90	-			-	
4	01	02	2,03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	3	dokumen	300.099.460	3	86.241.900	3	107.556.750	3	100.162.710	93,13	92.755.000	279.159.610	93,02
4	01	02	2,03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	2	kasus	1.100.100.000	2	136.235.400	2	435.955.900	2	352.166.952	80,78	411.806.750	900.209.102	81,83
4	01	02	2,03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan porduk hukum yang didokumentasikan	3	dokumen	177.472.328	3	58.700.470	3	7.978.550	3	6.770.890	84,86	7.978.000	73.449.360	41,39
4	01	02	2,04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen Kesepakatan Bersama/ Nota Kesepahaman yang difasilitasi	5	MoU/PKS	331.200.000	5	158.857.980	5	12.999.850	5	12.219.690	94,00	12.899.400	183.977.070	55,55
4	01	02	2,04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1	dokumen	310.100.000	1	152.214.980	1	9.999.950	1	9.871.990	98,72	9.946.000	172.032.970	55,48
4	01	02	2,04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1	laporan	21.100.000	1	6.643.000	1	2.999.900	1	2.347.700	78,26	2.953.400	11.944.100	56,61
4	01	03			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	78		2.005.699.910	83,26	526.041.717	76	395.018.550	91,58	361.133.850	91,42	342.906.500	1.230.082.067	61,33
4	01	03	2,01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	100	persen	450.200.000	100	177.753.327	100	136.802.850	100	123.180.270	90,04	97.032.150	397.965.747	88,40
4	01	03	2,01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1	dokumen	210.100.000	1	78.866.870	1	25.775.200	1	21.293.890	82,61	32.499.000	132.659.760	63,14
4	01	03	2,01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1	laporan	240.100.000	1	98.886.457	1	111.027.650	1	101.886.380	91,77	64.533.150	265.305.987	100,00
4	01	03	2,02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase hasil monitoring evaluasi yang ditindaklanjuti	100	persen	120.100.000	100	59.574.550	100	18.603.650	100	15.942.550	85,70	18.603.350	94.120.450	78,37
4	01	03	2,02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	laporan	120.100.000	12	59.574.550	12	18.603.650	12	15.942.550	85,70	18.603.350	94.120.450	78,37
4	01	03	2,03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui elektronik	100	persen	1.405.300.000	100	279.212.400	100	236.112.550	100	218.679.660	92,62	216.667.900	714.559.960	50,85
						Jumlah pembinaan dan pendampingan advokasi pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan	4	kali	-	4	-	4		3	-			-	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) sampai Tahun 2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dn Keluaran Kegiatan s/dinerja Renstra pada Renja s.d Tahun 2023 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
												Target Kinerja Anggaran Renja Tahun 2024 (n-2)		Realisasi Kinerja Anggaran Renja Tahun 2024 (n-2)			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Renstra Target Renstra (%)
4	01	03	2,03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	dokumen	660.100.000	1	24.344.500	1	63.741.150	1	61.171.060	95,97	26.245.900	111.761.460	16,93
4	01	03	2,03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1	dokumen	485.100.000	1	135.840.900	1	150.888.450	1	138.212.260	91,60	150.888.000	424.941.160	87,60
4	01	03	2,03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	40	orang	260.100.000	40	119.027.000	40	21.482.950	40	19.296.340	89,82	39.534.000	177.857.340	68,38
4	01	03	2,04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen kebijakan bidang pertambangan energi yang disusun	1	dokumen	30.099.910	1	9.501.440	1	3.499.500		3.331.370	95,20	10.603.100	23.435.910	77,86
4	01	03	2,04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1	dokumen	30.099.910	1	9.501.440	1	3.499.500	1	3.331.370	95,20	10.603.100	23.435.910	77,86

Tabel 2.2
Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2024

NO.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan		
		Target	Realisasi	Capaian
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	23.631.888.937	21.422.646.964	90,65%
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.921.350	131.891.690	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	68.737.850	65.762.370	95,67%
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.183.500	66.129.320	98,43%
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.433.216.102	9.126.380.512	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.956.523.102	8.671.127.592	87,09%
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	476.693.000	455.252.920	95,50%
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000	19.922.680	
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20.000.000	19.922.680	99,61%
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.973.129.500	3.870.343.368	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	80.155.000	72.031.500	89,87%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	360.600.000	357.575.000	99,16%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.224.150	32.182.000	99,87%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.847.750	41.745.930	99,76%
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	424.136.100	353.110.900	83,25%
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.329.726.500	1.309.457.265	98,48%
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.704.440.000	1.704.240.773	99,99%
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.977.357.005	2.786.058.860	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	959.900.668	869.912.228	90,63%
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	400.449.000	399.634.450	99,80%

NO.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan		
		Target	Realisasi	Capaian
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.617.007.337	1.516.512.182	93,79%
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.533.982.660	1.511.472.676	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	478.410.000	478.395.648	100,00%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	544.550.000	531.993.095	97,69%
3	Pemeliharaan Mebel	10.000.000	9.563.600	95,64%
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.320.000	24.315.000	99,98%
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	325.902.660	321.306.633	98,59%
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.000.000	39.570.500	92,02%
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	107.800.000	106.328.200	98,63%
VII	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	747.179.970	653.549.675	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	258.488.450	174.570.675	67,54%
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	86.191.520	85.250.000	98,91%
3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.500.000	-	0,00%
4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000	393.729.000	98,43%
X	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	694.470.800	668.223.829	
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	433.112.300	420.166.004	97,01%
2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	261.358.500	248.057.825	94,91%
XI	Penataan Organisasi	276.077.450	272.282.030	
1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	47.008.000	44.831.370	95,37%
2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	189.966.900	189.175.010	99,58%

NO.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan		
		Target	Realisasi	Capaian
3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	39.102.550	38.275.650	97,89%
XII	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.840.554.100	2.382.521.644	
1	Fasilitasi Keprotokolan	138.005.550	112.848.260	81,77%
2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2.357.064.200	1.960.030.384	83,16%
3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	345.484.350	309.643.000	89,63%
B	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	3.707.719.250	3.520.499.884	94,95%
I	Administrasi Tata Pemerintahan	779.447.000	761.335.482	
1	Penataan Administrasi Pemerintahan	338.853.850	332.820.507	98,22%
2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	63.888.950	62.606.625	97,99%
3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	376.704.200	365.908.350	97,13%
II	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	2.363.781.200	2.287.844.160	
1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	559.135.500	529.539.290	94,71%
2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1.566.861.550	1.539.533.720	98,26%
3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	237.784.150	218.771.150	92,00%
III	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	551.491.200	459.100.552	
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	107.556.750	100.162.710	93,13%
2	Fasilitasi Bantuan Hukum	435.955.900	352.166.952	80,78%
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	7.978.550	6.770.890	84,86%
IV	Fasilitasi Kerjasama Daerah	12.999.850	12.219.690	
1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	9.999.950	9.871.990	98,72%
2	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	2.999.900	2.347.700	78,26%
C	Program Perekonomian Dan Pembangunan	395.018.550	361.133.850	91,42%
I	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	136.802.850	123.180.270	

NO.	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan		
		Target	Realisasi	Capaian
1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	25.775.200	21.293.890	82,61%
2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	111.027.650	101.886.380	91,77%
II	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	18.603.650	15.942.550	
1	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	18.603.650	15.942.550	85,70%
III	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	236.112.550	218.679.660	
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	63.741.150	61.171.060	95,97%
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	150.888.450	138.212.260	91,60%
3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	21.482.950	19.296.340	89,82%
IV	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	3.499.500	3.331.370	
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	3.499.500	3.331.370	95,20%
JUMLAH		27.734.626.737	25.304.280.698	91,24

Tabel 2.1 dan tabel 2.2 diatas sudah dapat menggambarkan bahwa Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh pada tahun 2024 melaksanakan 3 program dengan anggaran sebesar Rp. 27.734.626.737,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.304.280.698,- atau sebesar 91,24%. Terdapat beberapa Sub Kegiatan yang realisasi dibawah 70% sebagai berikut :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, realisasi sebesar 67,54% rendahnya realisasi berkaitan dengan Pembayaran Insentif pajak dan retribusi KDH disesuaikan dengan Realisasi PAD Kota Payakumbuh Tahun 2024
- b. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, realisasi anggaran 0% disebabkan karena Intensitas kegiatan pimpinan yang padat sehingga Medical Check Up tertunda.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

A. Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf

yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah, dan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah didukung dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- (1) Sekretaris Daerah
Sekretaris Daerah membawahi:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan
 - c. Asisten Administrasi Umum
- (2) Masing-masing Asisten membawahi:
 - A. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi 3 Bagian, terdiri dari:
 1. Bagian Pemerintahan membawahi 3 Sub Bagian, terdiri dari
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemerintahan Umum
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Otonomi Daerah
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembinaan Wilayah
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi 3 Sub Bagian, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Bina Pendidikan Pariwisata, Pemudaran Olahraga
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Bina Kesejahteraan Sosial
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keagamaan dan Budaya
 3. Bagian Hukum, membawahi 3 Sub Bagian, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perundang-undangan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Dokumentasi Hukum
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Bantuan Hukum

- B. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahi 3 bagian, terdiri dari:
1. Bagian Perekonomian membawahi 3 Sub Bagian, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Bina Produksi Daerah
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Bina Pengembangan Ekonomi Daerah
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Kelembagaan Ekonomi Daerah
 2. Bagian PBJ dan Pengendalian Pembangunan membawahi 3 Sub Bagian, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Pengadaan Barang/ Jasa
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi LPSE
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Monitorng, evaluasi dan Pelaporan
 3. Bagian Perencanaan dan Anggaran membawahi 2 Sub Bagian, terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan
- C. Asisten Administrasi Umum, membawahi 3 Bagian, terdiri dari :
1. Bagian Organisasi membawahi 3 Sub Bagian, terdiri dari
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kelembagaan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Tata Laksana
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kepegawaian dan Kinerja
 2. Bagian Umum membawahi 3 Sub Bagian, terdiri dari
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Umum
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perlengkapan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Rumah Tangga
 3. Bagian Protokoler dan Dokumentasi membawahkan 3 Sub Bagian, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Protokoler
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Dokumentasi dan Informasi
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Tata Usaha Pimpinan
- D. Kelompok Jabatan Fungsional
- Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagai berikut:
1. Sekretaris Daerah

Mempunyai tugas membantu Walikota dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pemerintahan daerah, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas Sekretariat Daerah

Dalam menyelenggarakan tugas, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja sekretariat sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD)
- b. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota
- c. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pengaturan, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Staf Ahli dilingkungan Pemerintah Kota dan Kecamatan
- d. Penyelenggaraan pembinaan teknis administratif kepada Inspektorat
- e. Penyelenggaraan tugas lain dari Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Bertugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan pendidikan, kesehatan, Sosial, Tramtibum dan Linmas, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perpustakaan, Kearsipan, Keagamaan, Kecamatan dan Penyusunan produk hukum, pemberian bantuan hukum serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga;
- h. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- i. Kecamatan.

Fungsi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja Asisten mengacu pada rencana strategis Sekretariat Daerah.
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan pendidikan, kesehatan, sosial, tramtibus dan linmas, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perpustakaan, kearsipan, keagamaan, kecamatan, penyusunan produk hukum, pemberian bantuan hukum.
- c. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian pemantauan dan evaluasi bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tramtibus dan linmas, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perpustakaan, kearsipan, keagamaan, kecamatan, penyusunan produk hukum, pemberian bantuan hukum.
- d. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan

Mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, penanaman modal dan PTSP, Koperasi dan UMKM, Perdagangan, Perindustrian Tenaga Kerja, Energi Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Transmigrasi, Perhubungan, PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian, BUMD/Perbankan serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi :

- a. Dinas Ketahanan Pangan;
- b. Dinas Pertanian;
- c. Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
- d. Dinas Koperasi dan UKM;
- e. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- f. Dinas Perhubungan;
- g. Dinas PU dan Penataan Ruang;
- h. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

- i. Dinas Komunikasi dan Informasi;
- j. Dinas Lingkungan Hidup.

Fungsi Asisten Ekonomi dan Pembangunan sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja Asisten mengacu pada rencana strategi Sekretariat Daerah
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, penanaman modal dan PTSP, Koperasi dan UMKM, Perdagangan, Perindustrian Tenaga Kerja, Energi Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Transmigrasi, Perhubungan, PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian, BUMD/Perbankan
- c. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian pemantauan dan evaluasi urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, penanaman modal dan PTSP, Koperasi dan UMKM, Perdagangan, Perindustrian Tenaga Kerja, Energi Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Transmigrasi, Perhubungan, PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian, BUMD/Perbankan
- d. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

4. Asisten Administrasi Umum

Mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan organisasi dan ketatalaksanaan, pelayanan publik, pelayanan interen, pelayanan barang dan jasa serta urusan penunjang keuangan, perencanaan, kepegawaian dan diklat serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi :

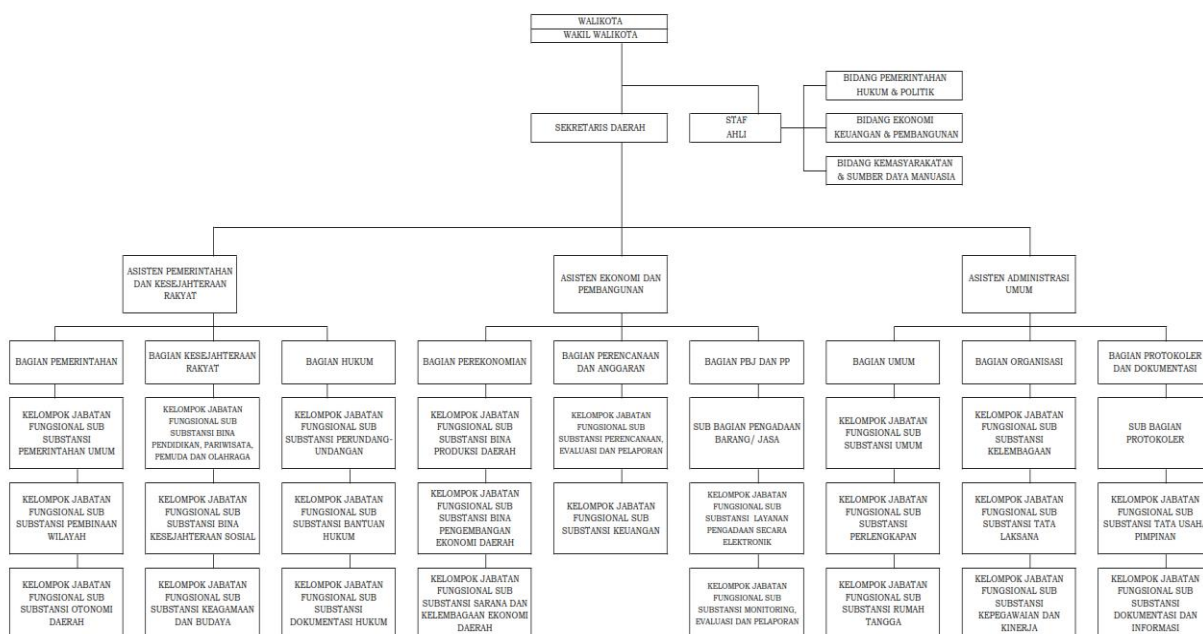
- a. Sekretariat DPRD;
- b. Inspektorat;
- c. BAPPEDA;
- d. Badan Keuangan Daerah;
- e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Kantor KesbangPol

Fungsi Asisten Administrasi Umum sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kerja Asisten mengacu pada rencana strategis Sekretariat Daerah
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum pada urusan organisasi dan ketatalaksanaan, pelayanan publik, pelayanan interen, pelayanan barang dan jasa serta urusan penunjang keuangan, perencanaan, kepegawaian dan diklat serta pengkoordinasian perangkat daerah dilingkup tugasnya
- c. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan organisasi dan ketatalaksanaan, pelayanan publik, pelayanan interen pelayanan barang dan jasa serta urusan penunjang keuangan, perencanaan, kepegawaian dan diklat serta pengkoordinasian perangkat daerah dilingkup tugasnya
- d. Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, dapat digambarkan Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh sebagai berikut :

Gambar 2.1
Bagan SOTK Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh



Berdasarkan penetapan kinerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh mempunyai indikator kinerja pelayanan, sebagaimana terlihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH

NO	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	IKU	SATUAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI				CATATAN ANALISIS
						2024	2025	2026	2027		2024	2025	2026	2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Indeks Reformasi Birokrasi				Indeks	83,5	84	85	86	83,28	84	85	86		
2	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	-	-	√	Nilai	3,1800	3,4000	3,4150	3,4400	3,0788	3,4000	3,4150	3,4400		
3	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	√	Indeks	76	91,58	91,58	91,58	91,58	91,58	91,58			
4	Indeks Pelayanan Publik	-	-	√	Indeks	4,24	4,51	4,52	4,53	4,5	4,28	4,30			
5	Indeks kepuasan Masyarakat	-	-	√	Indeks	88,5	88,60	88,80	88,85	88,37	88,60	88,80	88,85		
6	Nilai Evaluasi AKIP		-	√	Nilai	80	78,00	80,00	81,00	76,01	78,00	80,00	81,00		
7	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan secara kompetitif	-	√	-	Persentase	89,25	89,3	89,4	89,5	89,24	89,3	89,4	89,5		
8	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	-	√	-	Persentase	17,3	17,35	17,4	17,45	17,31	17,35	17,4	17,45		
9	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	-	√	-	Persentase	5	6	7	8	-7,08	6	7	8		

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 2 (dua) indikator sasaran Sekretariat Daerah yang ditargetkan ditahun 2024 secara umum telah tercapai, antara lain Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai dengan indeks 88,37 dari 88,50 yang ditargetkan, dengan persentase sebesar 99,85%. Sedangkan nilai LPPD tahun 2023 Sesuai ketentuan pasal Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan LPPD setiap tahun kepada pemerintah paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Berdasarkan data yang diterima Biro Pemerintahan Provinsi, penerimaan LPPD Tahun 2023, Kota Payakumbuh pada tanggal 30 Maret 2024 adalah Tepat waktu.

Namun hasil evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh tahun 2024 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh pada tahun 2023 belum dapat disajikan sampai dokumen ini ditetapkan karena masih menunggu terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2024 berdasarkan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun 2023.

Terlepas dari hal diatas, jika dilihat trend nilai LPPD Kota Payakumbuh tahun sebelumnya terjadi peningkatan secara signifikan sesuai hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD), Pemerintah Kota Payakumbuh berhasil meraih skor 3,3922 atau dengan status **“sedang”**. Dengan skor tersebut, Kota Payakumbuh menjadi yang terbaik diantara pemerintah Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat dan berada di peringkat 20 antar pemerintah Kota secara nasional. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.2.1.7.6646 tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2023 berdasarkan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun 2022.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan sarana prasarana.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang perlu dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh yang berkaitan dengan pelayanan kepada Perangkat Daerah pada tatanan kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan kelembagaan perangkat daerah.

Tata kelola pemerintahan dan kelembagaan perangkat daerah merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan karena untuk penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, perlu menyesuaikan kelembagaan perangkat daerah sesuai kebutuhan.

2. Belum optimalnya akuntabilitas dan kualitas pelaporan pemerintah daerah.

Kualitas pelaporan pemerintahan daerah yang belum optimal dikarenakan terdapatnya beberapa indikator-indikator pelaporan yang belum tercantum dalam dokumen perencanaan sehingga dalam masa pelaporan, data yang dibutuhkan tidak dapat disajikan dalam dokumen pelaporan.

3. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik dan ketatalaksanaan perangkat daerah

Dengan perkembangan teknologi pada saat ini dan kedepannya perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan pada kinerja pelayanan masing-masing perangkat daerah baik dari segi sumber daya manusia dan infrastruktur pelayanan.

4. Belum optimalnya pelayanan hukum sesuai dengan kewenangan daerah.

Kurangnya kualitas dan kuantitas aparatur yang memiliki standar kompetensi dibidang hukum

5. Belum optimalnya pengaruh kebijakan pengendalian inflasi daerah
Belum optimalnya dampak pengambilan kebijakan perekonomian untuk pengendalian laju inflasi daerah bagi masyarakat.
6. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum
Penyelenggaraan pemerintahan umum pada kecamatan dan kelurahan yang masih belum optimal sehingga perlu menjadi perhatian oleh pemerintah daerah di atasnya karena kecamatan dan kelurahan merupakan ujung tombak pelayanan.
7. Belum optimalnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Mekanisme pengadaan barang dan jasa sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku namun dalam proses pelaksanaannya masih perlu dioptimalkan baik dari proses awal perencanaan maupun pelaksanaan fisik pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan *time schedule* yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran. Selain itu dengan adanya program pemerintah dalam pembagian proporsi pemakaian produksi dalam negeri sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menyikapinya melalui pelaksanaan pengadaan barang/jasa dari awal proses pengadaan.
8. Masih banyak pelaku pengadaan yang belum memiliki Sertifikat Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa
9. Belum optimalnya pelaporan pelaksanaan kegiatan Pembangunan
10. Belum optimalnya pengelolaan lembaga keagamaan/ sosial dan bina mental spiritual masyarakat
Perlunya dilakukan perbaikan terhadap kepengurusan dari lembaga keagamaan sehingga dapat berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan dapat dirasakan manfaatnya ditengah masyarakat.
11. Belum optimalnya sarana dan prasarana serta fungsi rumah ibadah di Payakumbuh
12. Belum optimalnya kualitas pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
Perlunya ditingkatkan kualitas pelayanan terhadap Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Belum terpenuhi Sumber Daya Aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh

14. Belum optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran dan rumah dinas serta asset lainnya yang menjadi kewenangan Sekretariat Daerah

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Daerah adalah faktor internal dan eksternal Sekretariat Daerah, faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah antara lain :

1. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi oleh aparat pemerintah yang mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
2. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
3. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.
4. Adanya multi interpretasi terhadap otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

Sekretariat Daerah dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan dari permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kota Payakumbuh pada tahun 2025-2029 yang tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Oleh karena itu yang menjadi isu strategis Sekretariat Daerah dalam Renstra tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima
3. Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, responsif dan transparan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah dilakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 ditemukan beberapa perbedaan dengan kebutuhan anggaran Sekretariat Daerah tahun 2026. Hal ini disebabkan karena terdapat kebutuhan mendasar antara lain :

1. Terkait dengan kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah definitif seperti pengadaan kendaraan jabatan, kebutuhan rumah tangga KDH/ WKDH;
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Rumah Dinas KDH/ WKDH;
3. Penambahan anggaran untuk pemenuhan Hibah Masjid/ Musalla dan lembaga keagamaan lainnya.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 dan perubahannya dapat dilihat pada tabel 2.4. dibawah ini:

Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD TAHUN 2026
KOTA PAYAKUMBUH

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Pendukung				32.949.194.011	Urusan Pendukung				32.913.423.435	
	Urusan Pendukung Keseekretariatan Daerah					Urusan Pendukung Keseekretariatan Daerah					
	Sekretariat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	85		Sekretariat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	85		
			Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,4150				Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,4150		
			Indeks Pelayanan Publik	4,52				Indeks Pelayanan Publik	4,52		
			Indeks Kepuasan Masyarakat	88,8				Indeks Kepuasan Masyarakat	88,8		
			Indek Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	91,58				Indek Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	91,58		
			Nilai Evaluasi AKIP	80				Nilai Evaluasi AKIP	80		
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai IKM	89,04	27.729.339.061	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai IKM	89,04	26.922.122.285	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase capaian kinerja program/ kegiatan	100%	115.394.300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase capaian kinerja program/ kegiatan	100%	121.828.650	
			Nilai Evaluasi AKIP SETDAKO oleh Inspektorat	80,20				Nilai Evaluasi AKIP SETDAKO oleh Inspektorat	80,20		
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	16.812.300	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	16.812.300	
2)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	98.582.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	103.016.350	
3)	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	1.000.000	
4)	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 data	1.000.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	95%	11.495.957.303	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan	95%	11.900.103.972	
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 orang/bulan	10.935.957.303	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 orang/bulan	11.123.583.972	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	560.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 dokumen	776.520.000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	100%	50.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	100%	50.000.000	
1)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	50.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	50.000.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	85.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	85.875.500	
1)	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 paket	85.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 paket	85.875.500	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase layanan umum Sekretariat Daerah sesuai standar	100%	3.153.048.070	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase layanan umum Sekretariat Daerah sesuai standar	100%	1.743.375.650	
			Indeks layanan administrasi perangkat daerah	83,25				Indeks layanan administrasi perangkat daerah	83,25		
1)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 paket	65.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 paket	34.986.500	
2)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket Peralatandan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 paket	150.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket Peralatandan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 paket	59.988.400	
3)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 paket	69.748.070	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 paket	69.742.100	
4)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 paket	60.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 paket	59.959.000	
5)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	424.300.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	273.750.000	
6)	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	994.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	543.991.650	
7)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144 laporan	1.390.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144 laporan	699.958.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1.000.000	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor	90%	1.895.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor	90%	3.822.946.450	
1)	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	1.420.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	1.000.000	
2)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	75.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	1.000.000	
3)	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	100.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	40.800.000	
4)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 unit	100.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 unit	30.554.150	
5)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 unit	100.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 unit	3.728.529.800	
6)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	100.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	21.062.500	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	3.013.940.850	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	3.493.064.392	
1)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	991.040.850	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	953.905.000	
2)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	390.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	339.409.000	
3)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	1.632.900.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	2.199.750.392	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	90%	1.753.530.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	90%	1.391.343.020	
1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	612.180.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	601.400.000	
2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 unit	754.140.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 unit	604.100.000	
3)	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit	10.000.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit	10.000.000	
4)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	22.210.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	22.210.000	
5)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	230.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	79.948.660	
6)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	28.670.000	
7)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	45.014.360	
9	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan kepada KDH dan WKDH	100%	1.512.627.288	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan kepada KDH dan WKDH	100%	1.475.407.273	
1)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 orang/bulan	845.117.768	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 orang/bulan	808.224.623	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2)	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5 paket	66.119.520	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5 paket	65.792.650	
3)	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 orang	10.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 orang	10.000.000	
4)	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	591.390.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	591.390.000	
10	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Persentase pelayanan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan baik	100%	892.437.700	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Persentase pelayanan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan baik	100%	652.037.128	
1)	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	15 paket	476.300.500	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	15 paket	295.997.180	
2)	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	15 paket	321.242.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	15 paket	270.840.648	
3)	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	15 paket	94.895.200	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	15 paket	85.199.300	
11	Penataan Organisasi		Indeks Kelembagaan Perangkat Daerah	39,09%	946.871.650	Penataan Organisasi		Indeks Kelembagaan Perangkat Daerah	39,09%	201.238.900	
1)	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 dokumen	256.933.400	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 dokumen	74.300.650	
2)	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 laporan	239.273.750	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 laporan	56.273.750	
3)	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 dokumen	450.664.500	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 dokumen	70.664.500	
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Persentase acara kedinasan (seremonial keprotokolan) yang difasilitasi dengan baik	100%	2.815.531.900	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Persentase acara kedinasan (seremonial keprotokolan) yang difasilitasi dengan baik	100%	1.984.901.350	
1)	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 laporan	140.000.000	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 laporan	100.000.250	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2) Fasilitas Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	12 laporan	2.351.064.900	Fasilitas Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	12 laporan	1.601.064.600	
	3) Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 laporan	324.467.000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 laporan	283.836.500	
II	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,4150	4.724.687.550	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		Nilai LPPD	3,4150	5.654.335.950	
			Indeks Reformasi Hukum	87				Indeks Reformasi Hukum	87		
1	Administrasi Tata Pemerintahan		Persentase Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik	100%	858.555.700	Administrasi Tata Pemerintahan		Persentase Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik	100%	513.547.600	
			Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan tepat waktu	100%				Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan tepat waktu	100%		
	1) Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 dokumen	432.350.000	Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 dokumen	262.349.950	
	2) Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 dokumen	63.888.950	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 dokumen	63.888.950	
	3) Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 dokumen	362.316.750	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 dokumen	187.308.700	
2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	100%	3.295.131.150	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Persentase pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	100%	4.654.788.300	
	1) Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 dokumen	800.158.450	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 dokumen	400.158.250	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2)	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 dokumen	1.962.037.700	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 dokumen	2.887.525.450	
3)	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 dokumen	532.935.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 dokumen	1.367.104.600	
3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi	100%	558.000.850	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi	100%	473.000.650	
			Persentase koordinasi hukum yang difasilitasi	100%				Persentase koordinasi hukum yang difasilitasi	100%		
1)	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	3 dokumen	114.091.300	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	3 dokumen	89.091.200	
2)	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1 kasus	435.931.000	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1 kasus	375.930.900	
3)	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah produk hukum dan pengelolaan produk hukum yang didokumentasikan	3 dokumen	7.978.550	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah produk hukum dan pengelolaan produk hukum yang didokumentasikan	3 dokumen	7.978.550	
4	Fasilitasi Kerjasama Daerah		Jumlah dokumen Kesepakatan Bersama/ Nota Kesepahaman yang difasilitasi	5 MoU/PKS	12.999.850	Fasilitasi Kerjasama Daerah		Jumlah dokumen Kesepakatan Bersama/ Nota Kesepahaman yang difasilitasi	5 MoU/PKS	12.999.400	
1)	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 dokumen	9.999.950	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 dokumen	9.999.850	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2)	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 laporan	2.999.900	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 laporan	2.999.550	
III	Program Perekonomian Dan Pembangunan		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	91,58	495.167.400	Program Perekonomian Dan Pembangunan		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	91,58	336.965.200	
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	100%	221.047.100	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	100%	97.846.700	
1)	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 dokumen	94.673.500	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 dokumen	37.273.250	
2)	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 laporan	126.373.600	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 laporan	60.573.450	
2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Persentase hasil monitoring evaluasi yang ditindaklanjuti	100%	18.603.650	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		Persentase hasil monitoring evaluasi yang ditindaklanjuti	100%	18.603.400	
1)	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 laporan	18.603.650	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 laporan	18.603.400	
3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui elektronik	100%	242.153.600	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui elektronik	100%	207.152.050	
			Jumlah pembinaan dan pendampingan advokasi pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan	4 kali				Jumlah pembinaan dan pendampingan advokasi pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan	4 kali		
			Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan secara kompetitif	89%				Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan secara kompetitif	89%		
			Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	17%				Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	17%		
1)	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 dokumen	26.246.150	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 dokumen	26.245.900	
2)	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 dokumen	150.888.450	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 dokumen	150.887.150	
3)	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	40 orang	65.019.000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	40 orang	30.019.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Jumlah dokumen kebijakan bidang pertambangan energi yang disusun	1 dokumen	13.363.050	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		Jumlah dokumen kebijakan bidang pertambangan energi yang disusun	1 dokumen	13.363.050	
1)	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 dokumen	13.363.050	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	1 dokumen	13.363.050	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat Daerah merupakan unsur pendukung kesekretariatan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Masyarakat selaku pengguna layanan yang diselenggarakan pemerintah daerah seyogyanya tidak hanya menjadi objek layanan tetapi juga menjadi aktor, bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan standar pelayanan disetiap unit pelayanan merupakan amanat Undang-undang nomor 25 tahun 2008 tentang Pelayanan Publik.

Sekretariat Daerah telah mendesain beberapa kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, mulai dari penerapan standarisasi pelayanan, pengukuran kinerja pelayanan serta evaluasi kinerja pelayanan publik disetiap perangkat daerah dan unit pelayanan

Terkait dengan program dan kegiatan yang terlampir tidak ada terdapat usulan Musrenbang terkait dengan Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh sebagaimana terlampir pada Tabel 2.5. Persandingan daftar kegiatan prioritas hasil musrenbang kecamatan tahun 2026 dengan Renja Perangkat Daerah.

TABEL 2.5
PERSANDINGAN DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS HASIL MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2026 DENGAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

HASIL MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2026					KEGIATAN SESUAI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026		
NO	KEGIATAN PRIORITAS	LOKASI (KELURAHAN)	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	KEGIATAN RANCANGAN RENJA TAHUN 2026	PAGU INDIKATIF TAHUN 2026	CATATAN PENTING
	NIHIL						

TABEL 2.6
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026
KOTA PAYAKUMBUH

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standar penyelenggaraan *good governance* dan akuntabilitas publik.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh tahun 2026 telah mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka dapat digambarkan Interkoneksi Prioritas Daerah Kota Payakumbuh dengan Prioritas Nasional sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Interkoneksi Prioritas Daerah Kota Payakumbuh dengan Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional	Sasaran Nasional	Prioritas Kota Payakumbuh	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target Kinerja 2026
1.	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatnya Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	- Meningkatkan ya birokrasi yang bersih dan akuntabel - Meningkatkan ya pelayanan publik yang prima	- Nilai Evaluasi AKIP Kota - Indeks pengelolaan keuangan daerah - Indeks SPBE - Indeks kepuasan masyarakat	A (81) 78 3,415 88,80

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya keselarasan antara Prioritas Nasional dengan Prioritas Kota Payakumbuh, dimana Sasaran Nasional yaitu

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan diturunkan menjadi prioritas Kota Payakumbuh yakni Peningkatan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas. Khusus Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh hanya mengampu indikator sasaran “Indeks Kepuasan Masyarakat” yang dicantumkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh sedangkan indikator kinerja lainnya menjadi Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh, dimana tujuan dan sasaran yang satu dengan lainnya saling berhubungan. Tujuan sebagai turunan visi dan misi Pemerintah Daerah yang terkait erat dengan tugas yaitu:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

Sehubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan sasaran yang rinci yang harus dipenuhi dalam waktu satu tahun sehingga dapat menjamin keberhasilan rencana jangka menengah dan jangka panjang.

Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
3. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	CAPAIAN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		Indeks Reformasi Birokrasi	83,28	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00
		1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	1. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,0788	3,4000	3,4150	3,4400	3,4630	3,4824	3,5000
			2 Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	91,58	91,58	91,58	91,58	91,58	91,58	91,58
		2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1 Indeks Pelayanan Publik	4,50	4,51	4,52	4,53	4,54	4,55	4,56
			2 Indeks Kepuasan Masyarakat	88,37	88,60	88,80	88,85	88,90	88,95	89,00
		3 Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1 Nilai Evaluasi AKIP	76,01	78	80	81	82	83	84

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Penerapan regulasi baru dalam sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan yaitu Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Maka untuk tahun anggaran 2026, Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun 2026 tertuang dalam 3 (tiga) Program, 20 (dua puluh) Kegiatan dan 63 (enam puluh tiga) Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - c. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
 - d. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
2. Administrai Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrai Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
4. Administrai Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - c. Penyediaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan;
 - f. Fasilitasi kunjungan tamu
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pengadaan Mebel
 - d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c. Pemeliharaan Mebel
 - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 9. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - c. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - d. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 10. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
 - a. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
 - b. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
 - c. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
- 11. Penataan Organisasi
 - a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - b. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

- c. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- 12. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - a. Fasilitasi Keprotokolan
 - b. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
 - c. Pendokumentasian Tugas Pimpinan
- II. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan :
 - 1. Administrasi dan Tata Pemerintahan
 - a. Penataan Administrasi Pemerintahan;
 - b. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan;
 - c. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.
 - 2. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 - a. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
 - c. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
 - 3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
 - a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 - b. Fasilitasi Bantuan Hukum;
 - c. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum.
 - 4. Fasilitasi Kerjasama Daerah
 - a. Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri;
 - b. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.
- III. Program Perekonomian dan Pembangunan
Kegiatan :
 - 1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
 - b. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian.
 - 2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
 - a. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.
 - 3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
 - c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.

Rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta penganggaran, indikator dan target capaian kinerja dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut

Tabel 3.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Urusan Pendukung				32.913.423.435				41.833.960.436
4 01	Urusan Pendukung Keseekretariatan Daerah								
	Sekretariat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi		85				86	
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		3,4150				3,4400	
		Indeks Pelayanan Publik		4,52				5	
		Indeks Kepuasan Masyarakat		88,8				89	
		Indek Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa		91,58				92	
		Nilai Evaluasi AKIP		80				81	
4 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai IKM		89,04	26.922.122.285	DAU		89,06	32.552.733.836
4 01 01 2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi		100%	121.828.650	DAU		100%	185.812.300
		Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat		80,2				80,25	
4 01 01 2 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 dokumen	16.812.300			4 dokumen	25.812.300
4 01 01 2 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 laporan	103.016.350			4 laporan	140.000.000
4 01 01 2 0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1 dokumen	1.000.000			1 dokumen	10.000.000

Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Subkegiatan					Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	2	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah		1 data	1.000.000			1 data	10.000.000
4	01	01	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program kegiatan		95%	11.900.103.972	DAU		95%	12.876.694.153
4	01	01	2	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		85 orang/bulan	11.123.583.972			84 orang/bulan	12.076.694.153
4	01	01	2	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		12 dokumen	776.520.000			12 dokumen	800.000.000
4	01	01	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik		100%	50.000.000	DAU		100%	50.000.000
4	01	01	2	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1 dokumen	50.000.000			1 dokumen	50.000.000
4	01	01	2,1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah		100%	85.875.500	DAU		100%	90.875.500
4	01	01	2,1	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		85 paket	85.875.500			84 paket	90.875.500
4	01	01	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum Sekretariat Daerah sesuai standar		100%	1.743.375.650	DAU		100%	4.276.449.915
						Indeks layanan administrasi perangkat daerah		83,35				83,4	
4	01	01	2,1	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		9 paket	34.986.500			9 paket	90.000.000
4	01	01	2,1	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatandan Perlengkapan Kantor yang disediakan		2 paket	59.988.400			5 paket	150.000.000
4	01	01	2,1	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		20 paket	69.742.100			20 paket	99.748.070

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	2,1	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		3 paket	59.959.000			3 paket	70.000.000
4	01	01	2,1	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		3 dokumen	273.750.000			3 dokumen	424.300.000
4	01	01	2,1	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 laporan	543.991.650			1 laporan	1.694.000.000
4	01	01	2,1	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		144 laporan	699.958.000			144 laporan	1.738.401.845
4	01	01	2,1	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 dokumen	1.000.000			1 dokumen	10.000.000
4	01	01	2,1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor		90%	3.822.946.450	DAU		90%	2.026.000.000
4	01	01	2,1	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 unit	1.000.000			1 unit	1.000.000
5	01	01	3,1	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		3 unit	1.000.000			3 unit	125.000.000
4	01	01	2,1	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		3 unit	40.800.000			3 unit	100.000.000
4	01	01	2,1	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		6 unit	30.554.150			6 unit	300.000.000
4	01	01	2,1	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		6 unit	3.728.529.800			6 unit	1.400.000.000
4	01	01	2,1	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		4 unit	21.062.500			4 unit	100.000.000

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan		80%	3.493.064.392	DAU		80%	4.023.940.850
4	01	01	2,1	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	953.905.000			12 laporan	991.040.850
4	01	01	2,1	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 laporan	339.409.000			12 laporan	700.000.000
4	01	01	2,1	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan		12 laporan	2.199.750.392			12 laporan	2.332.900.000
4	01	01	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik		90%	1.391.343.020	DAU		90%	1.983.530.000
4	01	01	2,1	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		15 unit	601.400.000			15 unit	612.180.000
4	01	01	2,1	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		45 unit	604.100.000			45 unit	754.140.000
4	01	01	2,1	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		10 unit	10.000.000			10 unit	100.000.000
4	01	01	2,1	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 unit	22.210.000			10 unit	37.210.000
4	01	01	2,1	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 unit	79.948.660			4 unit	230.000.000
4	01	01	2,1	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 unit	28.670.000			4 unit	50.000.000

Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 01 2,1 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 unit	45.014.360			4 unit	200.000.000
4 01 01 2,1	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kepada KDH dan WKDH		100%	1.475.407.273	DAU		100%	1.755.117.768
4 01 01 2,1 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		2 orang/bulan	808.224.623			2 orang/bulan	945.117.768
4 01 01 2,1 0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		5 paket	65.792.650			5 paket	100.000.000
4 01 01 2,1 0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		8 orang	10.000.000			4 orang	10.000.000
4 01 01 2,1 0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 orang/bulan	591.390.000			2 orang/bulan	700.000.000
4 01 01 2,1	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase pelayanan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan baik		100%	652.037.128	DAU		100%	947.542.500
4 01 01 2,1 0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		15 paket	295.997.180			15 paket	476.300.500
4 01 01 2,1 0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		15 paket	270.840.648			15 paket	321.242.000
4 01 01 2,1 0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		15 paket	85.199.300			15 paket	150.000.000

Kode Rekening						Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	01	2,1			Penataan Organisasi	Indeks Kematangan Organisasi		40,03%	201.238.900	DAU		40,05%	1.261.238.950
							Indeks BerAKHLAK		73,5				74	
4	01	01	2,1	0001		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		1 dokumen	74.300.650			1 dokumen	374.300.700
4	01	01	2,1	0002		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		1 laporan	56.273.750			1 laporan	316.273.750
4	01	01	2,1	0003		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		2 dokumen	70.664.500			2 dokumen	570.664.500
4	01	01	2,1			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase acara kedinasan (seremonial keprotokolan) yang difasilitasi dengan baik		100%	1.984.901.350	DAU		100%	3.075.531.900
4	01	01	2,1	0001		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		12 laporan	100.000.250			12 laporan	200.000.000
4	01	01	2,1	0002		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		12 laporan	1.601.064.600			12 laporan	2.551.064.900
4	01	01	2,1	0003		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		12 laporan	283.836.500			12 laporan	324.467.000
4	01	02				Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		3,4150	5.654.335.950			3,4400	8.083.044.900
							Indeks Reformasi Hukum		87				87	
4	01	02	2			Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik		100%	513.547.600	DAU		100%	1.178.555.700
							Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan tepat waktu		100%				100%	
4	01	02	2	0001		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		3 dokumen	262.349.950			1 dokumen	532.350.000
4	01	02	2	0002		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		3 dokumen	63.888.950			1 dokumen	183.888.950

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	02	2	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		5 dokumen	187.308.700			5 dokumen	462.316.750
4	01	02	2		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat		100%	4.654.788.300	DAU		100%	6.333.488.500
4	01	02	2	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		1 dokumen	400.158.250			1 dokumen	1.650.158.450
4	01	02	2	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		1 dokumen	2.887.525.450			1 dokumen	2.816.225.450
4	01	02	2	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		1 dokumen	1.367.104.600			1 dokumen	1.867.104.600
4	01	02	2		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi		100%	473.000.650	DAU		100%	558.000.850
						Persentase koordinasi hukum yang difasilitasi		100%				100%	
4	01	02	2	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		3 dokumen	89.091.200			3 dokumen	114.091.300

Kode Rekening					Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	01	02	2	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		1 kasus	375.930.900			2 kasus	435.931.000
4	01	02	2	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan produk hukum yang didokumentasikan		3 dokumen	7.978.550			3 dokumen	7.978.550
4	01	02	2		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen Kesepakatan Bersama/ Nota Kesepahaman yang difasilitasi		5 MoU/PKS	12.999.400	DAU		5 MoU/PKS	12.999.850
4	01	02	2	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		1 dokumen	9.999.850			1 dokumen	9.999.950
4	01	02	2	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		1 laporan	2.999.550			1 laporan	2.999.900
4	01	03			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa		91,58	336.965.200			91,58	1.198.181.700
4	01	03	2		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ekonomi yang ditindaklanjuti		100%	97.846.700	DAU		100%	351.047.100
4	01	03	2	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		1 dokumen	37.273.250			1 dokumen	194.673.500
4	01	03	2	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		1 laporan	60.573.450			1 laporan	156.373.600
4	01	03	2		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase hasil monitoring evaluasi yang ditindaklanjuti		100%	18.603.400	DAU		100%	110.000.000
4	01	03	2	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		12 laporan	18.603.400			12 laporan	110.000.000

Kode Rekening	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 01 03 2	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui elektronik		100%	207.152.050	DAU		100%	627.134.600
		Jumlah pembinaan dan pendampingan advokasi pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan		4 kali				4 kali	
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan secara kompetitif		89%				90%	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan		17%				17%	
4 01 03 2 0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		1 dokumen	26.245.900			1 dokumen	226.246.150
4 01 03 2 0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		1 dokumen	150.887.150			1 dokumen	250.888.450
4 01 03 2 0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		40 orang	30.019.000			40 orang	150.000.000
4 01 03 2	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen kebijakan bidang pertambangan energi yang disusun		1 dokumen	13.363.050	DAU		1 dokumen	110.000.000
4 01 03 2 0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan		1 dokumen	13.363.050			1 dokumen	110.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh tahun 2026 terdiri dari beberapa 3 (tiga) Program, 20 (dua puluh) Kegiatan dan 63 (enam puluh tiga) Sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 32.913.423.435,- yang mendukung pencapaian sasaran strategis Sekretariat Daerah tahun 2026. Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2026 diuraikan dalam tabel 4.1. sebagai berikut :

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DAERAH						32.913.423.435,00							30.858.397.693,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						32.913.423.435,00							30.858.397.693,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						32.913.423.435,00							30.858.397.693,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM	-			88,80 Indeks	26.922.122.285,00						-	25.936.970.543,00	
		[Meningkatkan kualitas kerja dan kinerja perangkat daerah]	Nilai IKM	90.02	89.01	89.02	89.04	26.922.122.285,00	-	-	-	-	-	-	25.936.970.543,00	-
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	-			100 %	121.828.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh	-	117.394.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	16.812.300,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh		16.812.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	103.016.350,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh		98.582.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	1.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh		1.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	1.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh		1.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu	-			100 %	11.900.103.972,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh	-	11.495.957.303,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/bulan	11.123.583.972,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh		10.935.957.303,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	776.520.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh		560.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	-			100 %	50.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh	-	50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh		50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyediaan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 %	85.875.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Sekretariat Daerah	-	85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				85 Paket	85.875.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	ASN Sekretariat Daerah		85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks layanan administrasi perangkat daerah	-			75 %	1.743.375.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah	-	3.154.048.070,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	34.986.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah		65.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	59.988.400,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah		150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	69.742.100,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah		69.748.070,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	59.959.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah		60.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	273.750.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah		424.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	543.991.650,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah		994.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				144 Laporan	699.958.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah		1.390.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Sekretariat Daerah		1.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD	-			80 %	3.822.946.450,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pemerintah Kota Payakumbuh	-	402.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pemerintah Kota Payakumbuh		1.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pemerintah Kota Payakumbuh		1.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	40.800.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pemerintah Kota Payakumbuh		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	30.554.150,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pemerintah Kota Payakumbuh		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	3.728.529.800,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pemerintah Kota Payakumbuh		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	21.062.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pemerintah Kota Payakumbuh		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	-			80 %	3.493.064.392,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pemerintah Kota Payakumbuh	-	3.013.940.850,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	953.905.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pemerintah Kota Payakumbuh		991.040.850,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	339.409.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pemerintah Kota Payakumbuh		390.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.199.750.392,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pemerintah Kota Payakumbuh		1.632.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	-			80 %	1.391.343.020,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pemerintah Kota Payakumbuh	-	1.753.530.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	601.400.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pemerintah Kota Payakumbuh		612.180.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				45 Unit	604.100.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pemerintah Kota Payakumbuh		754.140.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pemerintah Kota Payakumbuh		10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	22.210.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pemerintah Kota Payakumbuh		22.210.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	79.948.660,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pemerintah Kota Payakumbuh		230.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	28.670.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pemerintah Kota Payakumbuh		25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	45.014.360,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pemerintah Kota Payakumbuh		100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kepada KDH dan WKDH	-			100 %	1.475.407.273,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kepala DAerah dan Wakil Kepala Daerah	-	1.421.649.520,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	808.224.623,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kepala DAerah dan Wakil Kepala Daerah		754.140.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				5 Paket	65.792.650,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kepala DAerah dan Wakil Kepala Daerah		66.119.520,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				8 Orang	10.000.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kepala DAerah dan Wakil Kepala Daerah		10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	591.390.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kepala DAerah dan Wakil Kepala Daerah		591.390.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persentase pelayanan kerumahtangaan Sekretariat Daerah dengan baik	-			100 %	652.037.128,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pemerintah Kota Payakumbuh	-	892.437.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				15 Paket	295.997.180,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pemerintah Kota Payakumbuh		476.300.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				15 Paket	270.840.648,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pemerintah Kota Payakumbuh		321.242.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				15 Paket	85.199.300,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pemerintah Kota Payakumbuh		94.895.200,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Indeks Kelembagaan Perangkat Daerah	-			39.09 %	201.238.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pemerintah Kota Payakumbuh	-	735.480.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				1 Dokumen	74.300.650,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pemerintah Kota Payakumbuh		256.933.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	56.273.750,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pemerintah Kota Payakumbuh		239.273.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	70.664.500,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pemerintah Kota Payakumbuh		239.273.750,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase acara kedinasan (seremonial keprotokolan) yang difasilitasi dengan baik	-			100 %	1.984.901.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pemerintah Kota Payakumbuh	-	2.815.531.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	100.000.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pemerintah Kota Payakumbuh		140.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Aparatur Kecamatan dan Kelurahan yang berkinerja baik Persentase laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disampaikan tepat waktu	-			100 % 100 %	513.547.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh	-	560.127.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				3 Dokumen	262.349.950,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh		432.350.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				3 Dokumen	63.888.950,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh		63.888.950,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				5 Dokumen	187.308.700,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh		63.888.950,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	-			100 %	4.654.788.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh	-	3.295.131.150,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				2 Dokumen	400.158.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh		800.158.450,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				3 Dokumen	2.887.525.450,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh		1.962.037.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				3 Dokumen	1.367.104.600,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh		532.935.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase koordinasi hukum yang difasilitasi Persentase rancangan produk hukum yang diharmonisasi	-			100 % 100 %	473.000.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh	-	558.000.850,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				3 Dokumen	89.091.200,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh		114.091.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum				1 Kasus	375.930.900,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh		435.931.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				3 Dokumen	7.978.550,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh		7.978.550,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah dokumen Kesepakatan Bersama/ Nota Kesepahaman yang difasilitasi	-			5 MoU/PKS	12.999.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh	-	12.999.850,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	9.999.850,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh		9.999.950,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	37.273.250,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh		94.673.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	60.573.450,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh		126.373.600,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase hasil monitoring evaluasi yang ditindaklanjuti	-			100 %	18.603.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh	-	18.603.650,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				12 Laporan	18.603.400,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh		18.603.650,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pembinaan dan pendampingan advokasi pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui elektronik	-			4 kali 100 %	207.152.050,00			Memperku a reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh	-	242.153.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	26.245.900,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperku a reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningka tan kualitas tata kelola penyelengg araan pem erintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh		26.246.150,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	150.887.150,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh		150.888.450,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				40 Orang	30.019.000,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh		65.019.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen kebijakan bidang pertambangan energi yang disusun	-			1 dokumen	13.363.050,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh	-	13.363.050,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air															
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	13.363.050,00	Kota Payakumbuh, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 3. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Kota Payakumbuh		13.363.050,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	JUMLAH							32.913.423.435,00							30.858.397.693,00		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2026, merupakan dokumen rencana operasional pembangunan di Tahun 2026, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2026. Isi dari Rencana Kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh tahun 2025-2029.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi *stakeholder* yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2026 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2026 baik dalam lingkup program, kegiatan dan sub kegiatan.
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan bersama.
3. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya.

Peran serta maksimal dari seluruh potensi *stakeholder* dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggungjawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Harapannya rencana kerja ini dapat mendorong peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kota Payakumbuh kedepannya.

Payakumbuh, 15 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH



Drs. RIDA ANANDA, M.Si
NIP. 19680607 198809 1 001